

# The Influence Of Budget Planning On Performance Regional Financial and Asset Agency (Empirical Study In Majalengka District)

Maman Nurachman<sup>1</sup>, Ida Sopiah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Sebelas April

maman.feb@unsap.ac.id, idasopiah.feb@unsap.ac.id

---

## Article Info

### Article history:

Received May  
02, 2024

Revised May  
23, 2024

Accepted June  
23, 2024

### Keywords:

Budget  
Planning,  
Performance

## ABSTRACT

The government has performance demands that lead to the interests of society by realizing the government's vision and mission. In implementing the performance programs the government requires a budget in implementing work programs. Budget planning is a budget setting plan for a certain period to carry out a work program. This study aims to determine the effect of budget planning on the performance of financial institutions and regional assets in Majalengka Regency., Analysis of the Coefficient of Determination and Hypothesis Testing. Based on the data collected and testing the results, it shows that Budget Planning has a positive and significant effect on the Performance of Financial Institutions and Regional Assets in Majalengka Regency, as evidenced by the  $t_{count}$  value for Budget Planning is 4,720 and  $t_{table}$  with  $\alpha = 5\%$  is known to be 2,026, thus  $t_{count}$  is greater than  $t_{table}$  and a significance value of  $0.000 < 0.05$ . Based on the results of the determination test, budget planning has an influence on the performance of Financial Institutions and Regional Assets with an effect of 37% and the remaining 63% is influenced by other factors not included in this study. So it can be concluded that budget planning has a strong influence on the performance of the Financial Agency and Regional Assets of Majalengka Regency.



Copyright © 2022 SINTESA. All rights reserved.

## Corresponding Author:

Maman Nurachman  
Program Studi Akuntansi,  
Fakultas Ekonomi & Bisnis,  
Jl. Angkrek Situ No.19, Situ, Kec. Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat Telp (0261) 202911  
Email: maman.feb@unsap.ac.id

---

## 1. INTRODUCTION

Setiap negara memiliki tujuan yang ingin dicapai, termasuk negara Indonesia memiliki tujuan yang tercantum dalam visi dan misi negara. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bekerjasama dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam kegiatan, program dan kebijakan. Pemerintah adalah organisasi publik di mana pemerintah dituntut agar memiliki kinerja yang mengarah pada kepentingan masyarakat, dengan memberikan pelayanan terbaik secara terbuka dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintahan tersebut. Tuntutan yang terus naik diajukan terhadap pertanggung jawaban yang diberikan oleh penyelenggaraan negara atas kepercayaan yang diamanahkan kepada mereka memberikan pelayanan terbaik secara terbuka dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintahan tersebut. Tuntutan yang terus naik diajukan terhadap pertanggung jawaban yang diberikan oleh penyelenggaraan negara atas kepercayaan yang diamanahkan kepada mereka.

Proses tahap perencanaan adalah salah satu tahap yang sangat penting dalam melaksanakan pengelolaan laporan keuangan daerah. Perencanaan dan penganggaran harus dilakukan dengan semestinya karena menjadi salah satu indikator penting yang akan menjadi penghambat bagi perangkat daerah. Akibat dari perencanaan dan penganggaran yang kurang baik, keduanya akan

berdampak pada kinerja suatu organisasi daerah. Oleh karena itu kesesuaian dalam menyusun, merencanakan dan melaksanakan anggaran diperlukan untuk mendukung program-program yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam mencapai visi dan misinya Kepala Daerah.

Proses tahap perencanaan adalah salah satu tahap yang sangat penting dalam melaksanakan pengelolaan laporan keuangan daerah. Perencanaan dan penganggaran harus dilakukan dengan semestinya karena menjadi salah satu indikator penting yang akan menjadi penghambat bagi perangkat daerah. Akibat dari perencanaan dan penganggaran yang kurang baik, keduanya akan berdampak pada kinerja suatu organisasi daerah. Oleh karena itu kesesuaian dalam menyusun, merencanakan dan melaksanakan anggaran diperlukan untuk mendukung program-program yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam mencapai visi dan misinya Kepala Daerah.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka merupakan salah satu SKPD yang bertugas membantu Bupati Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan fungsi dan urusan penunjang pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan. Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas menyusun LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). LAKIP berisi mengenai informasi bagaimana Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka diselenggarakannya pelaksanaan program dan kegiatan dan bagaimana pencapaiannya terhadap sasarannya. Pada tahun anggaran 2021 terdapat kesenjangan antara perencanaan anggaran dan realisasi anggaran serta indikator sasaran yang tidak tercapai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka. Perencanaan anggaran merupakan jumlah yang ditetapkan untuk menunjang berjalannya kegiatan atau program, dengan implementasi kegiatan program tentunya akan memenuhi indikator-indikator sasaran.

## **2. LITERATUR STUDY**

### **a. Kinerja Pemerintah Daerah**

Mahsum (2019: 2.3) mengemukakan, kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi.

Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini merupakan tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Sedangkan menurut Yusuf dan Maliki (2021:172) mengemukakan, kinerja adalah hasil seseorang, kelompok atau organisasi secara keseluruhan baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, selama periode tertentu didalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, berupa prestasi kerja yang merupakan tingkat keberhasilan dalam melaksanakan LAN (Sjafrizal, 2107:262) mengemukakan, kinerja (performance) pada dasarnya diartikan sebagai gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kebijakan, program atau kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan serta visi dan misi dari suatu negara, daerah atau organisasi. Kesan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### **b. Akuntabilitas Publik**

Mardiasmo (2018 : 27) mengemukakan, akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Terdiri atas dua macam, yaitu: (1) akuntabilitas vertikal (vertical accountability) dan (2) akuntabilitas horizontal (horizontal accountability). Mardiasmo (2018 : 27) mengemukakan, dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.

### **c. Anggaran**

Mahsum (2019:7.3) berpendapat “Anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter”. Anggaran ini merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang akan menerjemahkan berbagai program kedalam rencana keuangan tahunan yang lebih konkrit. Usulan anggaran pada umumnya

ditelaah atau ditinjau terlebih dahulu oleh pejabat yang lebih tinggi untuk bisa dijadikan anggaran formal.

Mardiasmo (2018:75) mengemukakan, anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak diacapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

#### **d. Perencanaan Anggaran**

Mardiasmo (2018:37) berpendapat, “Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategik, taktis dan melibatkan aspek operasional”. Sedangkan Haryanto, dkk (Majid, 2019:38) mengemukakan, anggaran dalam arti sempit meliputi rencana penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun saja. Penganggaran (budgeting) merupakan aktivitas mengalokasikan sumberdaya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja organisasi yang cenderung tidak terbatas.

Menurut Heriyanto dalam Mentari (2021) dimensi perencanaan anggaran di antaranya sebagai berikut :

1. Partisipasi semua elemen
2. Akurasi data
3. Proses perencanaan
4. Perencanaan dan kebijakan
5. Revisi dan perubahan anggaran

### **3. METHOD**

Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif survei. Metode survey adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau masa kini, tentang keyakinan pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel dan untuk menguji beberapahipotesis tentang variabel sosiologi dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu, teknik pengumpulan data dengan pengamatan (wawancara atau kuesioner) (Sugiyono, 2019: 57). Penelitian dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka dimulai dari bulan Desember Desember 2022 s/d Agustus 2023.

### **4. RESULTS AND DISCUSSION**

Berdasarkan pengujian menunjukkan bahwa nilai taraf signifikan 5%,  $R_{hitung} > R_{tabel} = 0,829 > 0,60$ . Dengan demikian instrumen variabel perencanaan anggaran (X) tersebut reliable, maka instrumen perencanaan anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka yang bersangkutan reliabel dan sah untuk digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan pengujian taraf signifikansi 5%,  $R_{hitung} > R_{tabel} = 0,848 > 0,60$ . Dengan demikian instrumen variabel kinerja Badan keuangan dan Aset Daerah (Y) tersebut reliable. Harga  $R_{hitung}$  positif lebih dari  $R_{tabel}$  menunjukkan bahwa instrumen variabel Y yang bersangkutan reliabel dan sah untuk digunakan dalam penelitian ini.

Hasil analisis normaitas kedua variabel diatas dengan nilai asymp sig 0,200, oleh karena itu asymp.sig tersebut lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data perencanaan anggaran (X) dan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah berdistribusi normal.

Persamaan regresi linear menunjukkan konstanta = 14,651 Artinya jika perencanaan anggaran (X) bernilai konstanta (nol) maka bernilai konstanta sebesar kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Y) bernilai konstanta sebesar 14,652. Perencanaan Anggaran (X) = 0,560 Artinya jika perencanaan anggaran (X) meningkat sebesar satu-satuan, maka akan mengakibatkan peningkatan perencanaan anggaran sebesar 0,561. Nilai signifikansi berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa variabel X memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 sehingga dapat dinyatakan signifikan, karena nilai signifikansi X lebih kecil dari nilai signifikansi  $\alpha$  yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel perencanaan anggaran (X) memiliki pengaruh terhadap variabel kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Hasil perhitungan koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0,608. Dengan demikian besarnya hubungan perencanaan anggaran dengan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar 0,608 dan ada pada interval 0,060 – 0,799 dapat dikatakan bahwa perencanaan anggaran dengan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki hubungan yang kuat. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diatas, nilai R square dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independent dalam menerangkan variabel dependent. Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai R Square sebesar 0,370 hal tersebut berarti bahwa 37% variabel kinerja Badan

Keuangan dan Aset Daerah dipengaruhi variabel perencanaan anggaran. Sedangkan sisanya (100% - 37%) adalah 63% dipengaruhi Faktor lain.

Berdasarkan tabel output SPSS uji hipotesis di atas dapat diketahui bahwa nilai *thitung* dari variabel perencanaan anggaran (X) terhadap Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Majalengka dapat di peroleh *thitung* sebesar 4.720 dengan nilai sig 0,000,. Hal ini menunjukkan bahwa nilai *thitung* lebih besar dari nilai *ttabel* 2.02439 dan nilai sig lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.

## 5. CONCLUSION

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan oleh penulis sebagai berikut:

- Hasil penelitian secara deskriptif terhadap variabel Perencanaan Anggaran (X) diketahui bahwa tanggapan responden terhadap perencanaan anggaran berada pada kategori sangat baik. Hal ini diartikan bahwa perencanaan anggaran Badan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka dilaksanakan dengan baik.
- Hasil penelitian terhadap variabel Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Y) diketahui tanggapan responden terhadap kinerja berada pada kategori baik. Hal ini diartikan bahwa kinerja yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka dilakukan dengan baik sesuai dengan program kerja yang direncanakan.
- Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan judul “pengaruh perencanaan anggaran terhadap kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (studi empiris di Kabupaten Majalengka)” dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Majalengka. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0,608 berada pada interval 0,60 – 0,799 yang berkategori kuat, dengan besar pengaruh perencanaan anggaran terhadap kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Majalengka sebesar 37%. Hasil uji hipotesis menyatakan  $thitung > ttabel$  atau  $4.720 > 1.941$  yang artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti terdapat pengaruh antara perencanaan anggaran terhadap kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Majalengka.

## 6. REFERENCES

- Annisa. dkk. (2022). “Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Pegawai Kantor BPKAD Kota Polo”. Jurnal Keunis. Vol. 10, (1), 13 – 21.
- Badan Keuangan dan Aset Daerah. (2022). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021. Majalengka.
- Fadhilatunnisa, A. dkk. (2021). “Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Penyerepan Anggaran Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Survey Di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung)”. Indonesia Accounting Research Journal. Vol. 1, (3), 577 – 586.
- Hadiwijoyo, S. dan Anisa, F. (2019). Perencanaan Pembangunan Daerah. Depok : PT RajaGrafindo Persada.
- Hajati, S. dkk. (2018). Buku Ajar Politik Hukum Pertahanan. Surabaya : Airlangga University Press.
- Hartati, A., dkk. (2022). Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Teori dan Aplikasi. Bandung : Media Sains Indonesia.
- Huda, N. (2019). Hukum Pemerintah Daerah. Bandung : Nusa Media.
- Iqbal, M. dkk. (2021). “Pengaruh Rencana Anggaran Dan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah”. Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi. Vol. 12, (2), 18-34.
- Kesumawati, N. Retta, A. dan Sari, N. (2018). Pengantar Statistika Penelitian. Depok : PT RajaGrafindo Persada.
- Mahsum, M. (2019). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Tangerang : Universitas Terbuka.
- Majid, J. (2019). Akuntansi Sektor Publik. Gowa : Pusaka Almada.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru). Yogyakarta : ANDI.
- Mayasari, R. (2022). Indikator Kinerja Pemerintah Daerah dan Model Penilaiannya. Yogyakarta : CV Budi Utama.

- Mentari, I. (2021). Pengaruh Perencanaan anggaran Terhadap Penurunan Realisasi Anggaran Program Peningkat Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2017 – 2019 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. Sarjana thesisi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah. Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 1569. Jakarta.
- Mulyono, S. dkk. (2021). Manajemen Pelaporan Pada Sistem Pembendaharaan dan Anggaran Negara. Jakarta : Direktorat Sistem Pembendaharaan dan Direktorat Jendral Pembendaharaan Kementerian Keuangan.
- Sjafrizal.(2017). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonom. Depok : PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta. Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung : Alfabeta.
- Wisdaningrum, O. (2022). “ Pengaruh Perencanaan Anggaran, Sistem Pengukuran Anggaran, Dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi”. Jurnal Akuntansi dan Pajak. Vol. 23, (01), 3.
- Yusuf, F. dan Maliki, B. (2021). Manajemen Sumber Daya Manusia. Depok : PT Raja Grafi Persada.